

PETA RESIKO BPMP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

No.	Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko	Prioritas Risiko	Pemilik Risiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	RTL Pengendalian	Target Waktu
		Kegiatan Risiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level	Penjelasan								
Kelompok Kerja 1																	
1	Workshop Penyusunan Instrumen dan Bahan Advokasi Peningkatan Persepsi Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemerintah Daerah	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
2	Advokasi ke Pemerintah Daerah Terkait Peningkatan Persepsi Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemerintah Daerah	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
3	Analisis Pengukuran Persepsi Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemerintah Daerah	1. Hasil Analisis Pengukuran kurang maksimal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
4	Workshop Pemetaan Guru Penggerak yang Memenuhi Syarat Kepsek atau Pengawas	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
5	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Kebijakan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
6	Advokasi ke Pemerintah Daerah Terkait Kebijakan Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi Kepsek atau Pengawas	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023

7	Workshop Penyusunan Bahan Advokasi ke Pemerintah Daerah Terkait Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka Peningkatan Delta Asesmen Nasional	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
8	Advokasi ke Pemerintah Daerah Terkait Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam Rangka Peningkatan Delta Asesmen Nasional	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
9	Workshop Penyusunan Bahan dan Model Mentoring System UPT	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
10	Pelaksanaan Sharing Session kepada insan UPT Tahap 1	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
11	Pelaksanaan Sharing Session kepada insan UPT Tahap 2	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
12	Pelaksanaan Sharing Session kepada insan UPT Tahap 3	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
13	FGD Penyusunan Strategi Komunikasi dan Bahan Advokasi ke Pemerintah Daerah Terkait Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023

14	Refleksi Kebijakan Merdeka Belajar Dengan Pemerintah Daerah	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
15	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Implementasi Platform Merdeka Mengajar (KMB 15)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
16	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Penggunaan BOS dan DAK (KMB 3)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
17	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Implementasi Aplikasi SIPLah (KMB 12)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
18	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Rapor Pendidikan dan PBD (KMB 19)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
19	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Sekolah Penggerak (KMB 7)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
20	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Guru Penggerak (KMB 5)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
21	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Asesmen Nasional (KMB 1)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023

22	IHT Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar Terkait PAUD dan Pendidikan Kesetaraan (KMB 16)	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
23	Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kegiatan UPT 2023	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
24	Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kegiatan UPT 2024	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
25	Rapat Koordinasi Penyusunan Power Map Pemangku Kepentingan di Daerah	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
26	Koordinasi dan Advokasi terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar oleh Pemerintah Daerah	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
27	Monitoring dan Evaluasi ke Pemerintah Daerah Terkait Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar	1. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Tidak ada juknis resmi kegiatan dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
28	Sosialisasi dan Koordinasi tentang Kebijakan Implementasi Gerakan Sekolah Sehat ke Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan 2. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023

29	Sosialisasi dan Koordinasi Sekolah Sehat dengan satuan pendidikan	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Tidak tercapainya tujuan kegiatan secara utuh sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan 2. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cek-in belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
30	Bimbingan Teknis Pemetaan Status Imunisasi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cek-in belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
31	Bimbingan Teknis Pemetaan Status Kebugaran Peserta Didik di Satuan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cek-in belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
32	Advokasi Gerakan Sekolah Sehat dengan Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
33	Advokasi Gerakan Sekolah Sehat dengan Satuan Pendidikan Binaan	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
34	Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Koordinasi dengan pemerintah daerah kurang maksimal	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah kab/kota/prop	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya pelaksanaan kampanye hingga menyentuh ke seluruh satuan pendidikan	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Sosialisasi hanya sebatas koordinasi dengan Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan Kampanye Sekolah Sehat dilakukan dengan pemerintah daerah meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Satuan Pendidikan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang Kampanye Gerakan Sekolah Sehat.	Mei s.d. Desember 2023

35	Pendampingan Gerakan Sekolah Sehat ke Satuan Pendidikan Binaan Tahap 1	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
36	Pendampingan Gerakan Sekolah Sehat ke Satuan Pendidikan Binaan Tahap 2	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023
37	Rakor Program Sekolah Sehat dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
38	Rakor Pemetaan Status Kesehatan Satuan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
39	Rakor penyusunan strategi pelibatan mitra pembangunan daerah terkait Gerakan Sekolah Sehat	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kehadiran peserta tidak 100%	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Belum ada pengendalian terkait kehadiran peserta	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	- Koordinasi dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dan panduan/juknis kegiatan - Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei s.d. Desember 2023
40	Coaching clinic Sekolah Binaan GSS Tahun 2023	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reviu	Mei s.d. Desember 2023

41	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat di Kab/Kota/Provinsi	1. Pelaksanaan kegiatan tertunda/tidak sesuai jadwal 2. Kebijakan tidak tersampaikan oleh petugas	1. Menunggu panduan/juknis kegiatan terkait Gerakan Sekolah Sehat dari pusat 2. Kompetensi petugas terkait materi kurang memadai	1. Pelaksanaan Kegiatan tertunda karena menunggu juknis/panduan dari pusat 2. Tidak maksimalnya informasi materi yang diterima oleh stakeholder di daerah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	- Segera melaksanakan kegiatan setelah ada juknis/panduan dari pusat - Adanya pembekalan penguatan kompetensi bagi setiap petugas	1. Adanya IHT penguatan kompetensi bagi setiap petugas 2. Menjelaskan ke petugas terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah	Dilakukan reuiu	Mei s.d. Desember 2023
----	--	--	---	--	-------------	---	----------------	---	------------	----	---	--------	--------	--	---	-----------------	------------------------

Kelompok Kerja 2																	
1	Workshop Internal delta nilai rapor pendidikan	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan raport pendidikan diterima oleh peserta	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei 2022
2	Workshop Internal delta nilai rapor pendidikan	Belum adanya rapor pendidikan	Keterlambatan rilis rapor pendidikan oleh BSKAP	Workshop internal delta belum dapat dilakukan	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	Melakukan koordinasi dengan PIC 01 Pusat	Melakukan penjadualan ulang terhadap perencanaan program/kegiatan.	Melakukan penjadualan ulang terhadap perencanaan program/kegiatan setelah mengetahui rilis dari rapor pendidikan	Mei-23
3	Koordinasi dengan penda dan BGP dalam rangka peningkatan rapor pendidikan bagi PSP angkatan 1 dan 2	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Tidak maksimalnya koordinasi	Operasional	4	Sering terjadi	2	minor	12	3	sedang	Kepala	1. Penanggungjawab wilayah dari BPMP 2. Tersedianya koordinator wilayah	1. Dalam surat pemberitahuan telah memuat waktu kegiatan 2. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan	1. menyampaikan surat ke dinas terkait 2. berkoordinasi dengan tim yang menangani PSP di daerah 3. tim BPMP melakukan koordinasi dengan tim daerah terkait rakor PSP	Mei-23
4	Workshop strategi peningkatan skor raport dengan Dinas Kabupaten/Kota BGP dan PSP	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua 3. Peserta yang datang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Workshop tidak berjalan secara maksimal	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	tinggi	Kepala	1. Penanggungjawab wilayah dari BPMP 2. Tersedianya koordinator wilayah	1. Dalam surat pemberitahuan telah memuat waktu kegiatan 2. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan	1. Kompetensi peserta yang dibutuhkan tercantum jelas di dalam surat undangan peserta 2. Tenggat waktu kehadiran peserta dibatasi di hari pertama workshop	Mei-23
5	Pelaksanaan pendampingan penguatan literasi ke sekolah PSP	Petugas belum paham terkait pendampingan literasi sekolah PSP	Belum ada informasi terkait pendampingan literasi sekolah PSP	Tujuan dari pendampingan penguatan literasi ke sekolah psp tidak tercapai	Operasional	2	Jarang	3	Moderat	6	2	Rendah	Kepala	Adanya pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan kegiatan	1. Adanya pembekalan mengenai tujuan dan strategi pelaksanaan pendampingan 2. Adanya koordinasi secara intensif dengan tim daerah 3. Adanya pengendalian kegiatan money dari tim pengendalian kegiatan BPMP	Dilakukan reviu	Agu-23
6	Pemetaan sekolah dan kombine kegiatan	Peta sekolah dan kombine sebagai sasaran pengimbasan oleh guru-guru PSP belum dapat dibuat	Belum adanya data sekolah dan kombine sebagai sasaran pengimbasan oleh guru-guru PSP	Peta sekolah dan kombine sebagai sasaran pengimbasan oleh guru-guru PSP tidak bisa dibuat	Operasional	2	Jarang	3	Moderat	6	2	Rendah	Kepala	1. Koordinasi dengan dinas pendidikan terkait data sekolah imbas PSP 2. Koordinasi dengan dinas pendidikan terkait kombine	1. Koordinasi dengan dinas pendidikan dan BGP terkait data sekolah imbas PSP 2. Koordinasi dengan dinas pendidikan dan BGP terkait kombine	Melibatkan BGP dalam melakukan pemetaan sekolah dan kombine	Mei-23
7	Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FPKD) (PSP ANGKATAN 1 DAN 2)	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah PSP angkatan 1 dan 2	Operasional	3	Sering terjadi	2	minor	6	2	sedang	BPMP	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BGP	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BGP	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BGP	Jun-23
8	Sosialisasi ke Penda terkait Kebijakan implemetasi sekolah penggerak	Pemahaman Penda dan KS Satuan pendidikan terhadap PSP kurang komprehensif	Kemampuan KS dan Komitmen Penda yang berdeda-beda	Pelaksanaan PSP tidak maksimal	Operasional	3	Kadang	3	Moderat	9	3	Sedang	BPMP	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut sosialisasi ke Penda dan ke satuan Pendidikan	Program tindak lanjut sosialisasi yang berkesinambungan yang dilakukan dinas pendidikan Prov/Kab/Kota terhadap Satuan Pendidikan	Sosialisasi oleh BPMP kepada Disdik Prov/Kab/Kota terkait PSP	Mei-23

9	Pelaksanaan advokasi ke Pemda	Terdapat poin-poin dalam Kepmendikbud 371 tahun 2021 yang belum dilaksanakan di dinas pendidikan	pemahaman terhadap Kepmendikbud 371 tahun 2021 belum komprehensif	Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan belum mengacu kepada Kepmendikbud 371 tahun 2021	Operasional	2	Jarang	3	Moderat	6	2	Rendah	BPMP dan Dinas Pendidikan	Petugas advokasi dibekali pemahaman terkait implementasi PSP	Petugas advokasi dibekali pemahaman terkait implementasi PSP	Petugas advokasi dibekali pemahaman terkait implementasi PSP	Agu-23
10	Pemantauan komitmen Pemda terkait implementasi PSP	Kepala Daerah tidak mau melaksanakan PSP	Belum adanya Pemahaman Kepala Daerah terhadap PSP	implementasi PSP tidak dapat dilaksanakan	Operasional	1	Jarang	3	Moderat	9	2	Tinggi	BPMP dan Pemerintah Daerah	Aplikasi pemantauan di dashboard UPT	Aplikasi pemantauan di dashboard UPT	Aplikasi pemantauan di dashboard UPT	Agu-23
11	Pelaksanaan PMO (Project Management Office) PSP	tidak ada sinkronisasi kegiatan yang dilakukan upt pdm dan gtk dalam mengimplementasikan PSP	tidak adanya koordinasi antara UPT PDM dan GTK dalam melaksanakan PSP	tidak maksimalnya implmentasi PSP	Operasional	3	Kadang	3	Moderat	9	3	Sedang	BPMP, BGP, dan Dinas Pendidikan	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut pendampingan ke Pemda	Program tindak lanjut pendampingan yang berkesinambungan yang dilakukan BPMP terhadap Pemda	Pendampingan oleh BPMP ke Disdik Prov/Kab/Kota terkait PSP	Des-23
12	Rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, BGP dan Pengawas terkait Pendampingan Miskonsepsi IKM	1. Peserta tidak hadir 100% saat rakor dimulai	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Tidak maksimalnya pengumpulan data miskonsepsi IKM	Kebijakan	3	kadang terjadi	3	moderat	14	3	sedang	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta. Mengisi format kesanggupan, dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Agustus 2023
13	Bimtek petugas pendampingan pemanfaatan PMM bagi sekolah pelaksana IKM	Peserta tidak hadir 100% saat kegiatan dimulai	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan pendampingan	Operasional	2	jarang terjadi	2	tidak signifikan	2	1	sangat rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta. Mengisi format kesanggupan, dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Agustus 2023
14	Pendampingan pemanfaatan PMM bagi sekolah pelaksana IKM	1. Petugas dinas lupa password akun SIM PKB 2. koneksi internet buruk	1. terlalu banyak password akun pribadi 2. gangguan koneksi internet	unduh dokumen terganggu dan kegiatan akses PMM terkendala	Operasional	2	jarang terjadi	3	moderat	11	2	rendah	kepala	1. Mengingatkan password mudah untuk diingat 2. tersedianya kuota internet yang cukup	1. Dalam surat pemberitahuan telah memuat proses dan jadwal kegiatan 2. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan	1. menyampaikan surat ke dinas terkait kegiatan pemanfaatan PMM 2. berkordinasi dengan tim pendamping dinas	Agustus 2023
15	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait IKM kepada satuan pendidikan	Terdapat poin-poin dalam IKM yang belum dilaksanakan oleh dinas pendidikan	pemahaman terhadap Kurikulum merdeka belum komprehensif	hal-hal dalam Kurikulum Merdeka masih belum diimplementasikan secara keseluruhan	Operasional	2	Jarang	3	Moderat	6	2	Rendah	Dinas Pendidikan	Petugas advokasi dibekali pemahaman IKM	1. Adanya pembekalan mengenai content/isi advokasi 2. Adanya pengendalian kegiatan advokasi dari tim pengendalian kegiatan BPMP	1. Adanya pembekalan mengenai content/isi advokasi 2. Adanya pengendalian kegiatan advokasi dari tim pengendalian kegiatan BPMP	Mei - Desember 2023
16	Bimtek optimalisasi aktivitas komunitas belajar dalam mendukung IKM	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya pengumpulan data komunitas belajar	Operasional	4	Sering terjadi	2	minor	12	3	sedang	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei - Desember 2023
17	Monitoring optimalisasi aktivitas komunitas belajar dalam mendukung IKM	Hasil Pelaporan yang didapat kurang valid	Tidak ada tindak lanjut hasil Pelaporan atas monitoring dan Evaluasi	Terdapat beberapa masalah yang belum terpecahkan	operasional	3	Kadang-kadang	4	tinggi	12	3	sedang	Kepala	Adanya pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan kegiatan	1. Adanya pembekalan mengenai content/isi instrumen movev dan sasaran kepada petugas movev 2. Adanya pengendalian kegiatan BPMP	1. Melakukan pembekalan mengenai isi instrumen dan sasaran movev kepada petugas movev 2. Melakukan pengendalian kegiatan movev oleh tim pengendalian BPMP	Mei - Desember 2023
Kelompok Kerja 3																	

1	UPT melakukan sosialisasi SPM Pendidikan termasuk Surat MM terkait SPM Pendidikan	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Informasi belum tersampaikan	operasional	4	sering terjadi	4	moderat	16	4	Tinggi	kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cek in dan belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei - Desember 2023
2	UPT melakukan pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD)	Pendampingan tidak maksimal	petugas belum paham terkait pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD)	tidak maksimalnya pendampingan karena tidak tercapainya tujuan pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD)	Operasional	3	jarang Terjadi	2	moderat	14	4	Tinggi	kepala	melakukan pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan kegiatan	1. Adanya pembekalan mengenai tujuan dan strategi pelaksanaan pendampingan 2. Adanya koordinasi secara intensif dengan tim daerah 3. Adanya pengendalian kegiatan movev dari tim pengendalian kegiatan BPMP	reviu	Mei - Oktober 2023
3	UPT melakukan pemantauan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD	belum masuknya seluruh indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD	dalam RKKPD belum / tidak memasukan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan	implementasi program SPM Pendidikan belum maksimal	operasional	3	jarang terjadi	3	moderat	16	4	Tinggi	kepala	memberikan penjelasan penting memasukan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD kepada yang terkait	1. Adanya pembekalan mengenai indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD	advokasi oleh BPMP kepada pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan terkait SPM Pendidikan	agustus-september 2023
4	UPT melakukan pemantauan pelaksanaan atau realisasi SPM Pendidikan di daerah	belum masuknya seluruh indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD	dalam RKKPD belum / tidak memasukan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan	implementasi program SPM Pendidikan belum maksimal	operasional	3	jarang terjadi	3	moderat	16	4	Tinggi	kepala	memberikan penjelasan penting memasukan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD kepada yang terkait	1. Adanya pembekalan mengenai indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKKPD	advokasi oleh BPMP kepada pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan	Mei - Oktober 2023
5	Melakukan manajemen risiko dan isu	Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan manajemen risiko dan isu	Tidak ada tindak lanjut hasil Pelaporan atas monitoring dan Evaluasi	Terdapat beberapa masalah yang belum terpecahkan terkait pelaksanaan manajemen risiko dan isu	operasional	3	Kadang- kadang	4	Signifikan	17	3	Tinggi	Kepala	Adanya pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan kegiatan manajemen risiko dan isu	1. Adanya pembekalan mengenai content/isi instrumen movev dan sasaran kepada petugas movev 2. Adanya pengendalian kegiatan movev dari tim pengendalian kegiatan BPMP	1. Melakukan pembekalan mengenai isi instrumen dan sasaran movev kepada petugas movev 2. Melakukan pengendalian kegiatan movev oleh tim pengendalian BPMP	Mei - Oktober 2023
1	Rapat Koordinasi Perencanaan Berbasis Data Tingkat Daerah dan Satuan Pendidikan	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua 3. Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan rapor pendidikan diterima oleh peserta 2. Target pencapaian objektif kegiatan tidak tercapai	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan 3. Dalam surat undangan dilampiri dengan <i>term of reference</i> untuk memberikan gambaran urgensi kegiatan 4. Melibatkan pihak yang diundang dalam acara sebagai narasumber atau fasilitator	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei 2023

2	Bimbingan Teknis Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Tim PBD Daerah	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua 3. Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan rapor pendidikan diterima oleh peserta 2. Target pencapaian objektif kegiatan tidak tercapai	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan 3. Dalam surat undangan dilampiri dengan <i>term of reference</i> untuk memberikan gambaran urgensi kegiatan 4. Melibatkan pihak yang diundang dalam acara sebagai narasumber atau fasilitator	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei 2023
3	Advokasi melalui PMO	1. Partisipasi aktif peserta kurang 2. Tujuan PMO PBD dan Rapor tidak tercapai	1. Minat terjadap kegiatan yang bersifat dari kurang 2. Tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang pentingnya PMO	tidak didapatkannya data evaluasi implementasi Rapor Pendidikan dan PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Peserta diundang hanya sebagai partisipan yang pasif	Peserta dilibatkan juga secara lebih aktif misal sebagai story teller untuk praktik baik dan paparan masalah-masalah yang terjadi di satuan pendidikan	Mencantumkan agenda dalam surat dan mengundang satuan pendidikan untuk terlibat aktif	
4	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan yang telah mengikuti AN untuk mengakses Rapor Pendidikan	1. Pemerintah tidak memberikan respon cukup terjadap program Rapor Pendidikan 2. Pemda tidak bersedia memberikan dorongan kepada satuan pendidikan untuk mengakses rapor pendidikan	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan rapor pendidikan diterima oleh peserta 2. Target pencapaian objektif kegiatan tidak tercapai	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	k	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan dilampiri dengan <i>term of reference</i> untuk memberikan gambaran urgensi kegiatan 4. Melibatkan pihak yang diundang dalam acara sebagai narasumber atau fasilitator	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei 2023
5	Coaching clinic akses platform Rapor Pendidikan melalui komunitas belajar	1. Objektive coaching clinic tidak tercapai sesuai yang ditetapkan 2. Peserta yang hadir tidak sesuai sasaran yang ditetapkan 3. Jaringan Internet di lokasi tidak memadai sehingga menghambat kegiatan	1. Kesadaran akan pentingnya kegiatan blm cukup dari sasaran 2. Kurangnya sarana dan prasarana	Pencapaian objektif akses rapor pendidikan oleh satuan pendidikan tidak maksimal sesuai rencana dan pbd di satuan pendidikan tidak 100% berjalan dengan baik di satuan pendidikan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Undangan langsung dr BPMP ke Satuan Pendidikan	Melibatkan pihak dinas pendidikan untuk mengundang satuan pendidikan	Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengundang sekolah	Juni 2023
6	Pendampingan ke satuan pendidikan afirmasi akses rapor pendidikan bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki internet dan listrik jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA	1. Tujuan pendampingan ke sekolah afirmasi tidak tercapai sesuai obektif yang ditetapkan 2. Sekolah sasaran tidak semua dapat diakses karena kendala akses	1. Peserta tidak memiliki cukup antusias untuk mengikuti kegiatan 2. Tim Pelaksana tidak memiliki kompetensi yang sama pada setiap sarasanya	1. Objektif jumlah sekolah yang mengakses rapor pendidikan dan mendownload lembar rekomendasi PBD tidak sesuai target yang telah ditetapkan 2. Perencanaan sekolah tidak menggunakan prinsip PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	BPMP Lampung berkordinasi dengan satuan pendidikan	BPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah agar mendapatkan respon yang lebih	Kordinasi dengan dinas pendidikan untuk turut mengundang satuan pendidikan afirmasi	Juni 2023

7	Afirmasi akses rapor pendidikan bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki internet dan listrik jenjang SMP & SMA	1. Tujuan pendampingan ke sekolah afirmasi tidak tercapai sesuai obektif yang ditetapkan 2. Sekolah sasaran tidak semua dapat diakses karena kendala akses	1. Peserta tidak memiliki cukup antusias untuk mengikuti kegiatan 2. Tim Pelaksana tidak memiliki kompetensi yang sama pada setiap sarasannya	1. Objektif jumlah sekolah yang mengakses rapor pendidikan dan mendownload lembar rekomendasi PBD tidak sesuai target yang telah ditetapkan 2. Perencanaan sekolah tidak menggunakan prinsip PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	BPMP Lampung berkordinasi dengan satuan pendidikan	BPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah agar mendapatkan respon yang lebih	Kordinasi dengan dinas pendidikan untuk turut mengundang satuan pendidikan afirmasi	Juni 2023
8	Afirmasi akses rapor pendidikan bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki internet dan listrik jenjang PAUD	1. Tujuan pendampingan ke sekolah afirmasi tidak tercapai sesuai obektif yang ditetapkan 2. Sekolah sasaran tidak semua dapat diakses karena kendala akses	1. Peserta tidak memiliki cukup antusias untuk mengikuti kegiatan 2. Tim Pelaksana tidak memiliki kompetensi yang sama pada setiap sarasannya	1. Objektif jumlah sekolah yang mengakses rapor pendidikan dan mendownload lembar rekomendasi PBD tidak sesuai target yang telah ditetapkan 2. Perencanaan sekolah tidak menggunakan prinsip PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	BPMP Lampung berkordinasi dengan satuan pendidikan	BPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah agar mendapatkan respon yang lebih	Kordinasi dengan dinas pendidikan untuk turut mengundang satuan pendidikan afirmasi	Juni 2023
9	Afirmasi akses rapor pendidikan bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki internet dan listrik jenjang SMP & SMA	1. Tujuan pendampingan ke sekolah afirmasi tidak tercapai sesuai obektif yang ditetapkan 2. Sekolah sasaran tidak semua dapat diakses karena kendala akses	1. Peserta tidak memiliki cukup antusias untuk mengikuti kegiatan 2. Tim Pelaksana tidak memiliki kompetensi yang sama pada setiap sarasannya	1. Objektif jumlah sekolah yang mengakses rapor pendidikan dan mendownload lembar rekomendasi PBD tidak sesuai target yang telah ditetapkan 2. Perencanaan sekolah tidak menggunakan prinsip PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	BPMP Lampung berkordinasi dengan satuan pendidikan	BPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pengawas sekolah agar mendapatkan respon yang lebih	Kordinasi dengan dinas pendidikan untuk turut mengundang satuan pendidikan afirmasi	Juni 2023
10	Monitoring Pelaksanaan Uji Kesetaraan Jenjang Paket C	1. Tujuan monitoring pelaksanaan uji kesetaraan jenjang paket C yang ditetapkan tidak tercapai 2. Sekolah sasaran monitoring uji kesetaraan tidak memberikan respon yang cukup	Sekolah masih belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat uji kesetaraan	partisipasi uji kesetaraan jenjang paket c tidak sesuai target yang ditetapkan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
12	Advokasi ke pemma untuk melakukan sosialisasi ke satpen untuk mengakses Rapor Pendidikan dan PBD				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
13	Memberikan Pendampingan PBD Satpen kepada PMO Disdik, Kombel PBD, mitra pembangunan dalam pelaksanaan PBD untuk Satdik	1. Partisipasi aktif peserta kurang 2. Tujuan PMO PBD dan Rapor tidak tercapai	1. Minat terjadap kegiatan yang bersifat dari kurang 2. Tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang pentingnya PMO	tidak didapatkannya data evaluasi implementasi Rapor Pendidikan dan PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Peserta diudang hanya sebagai partisipan yang pasif	Peserta dilibatkan juga secara lebih aktif misal sebagai story teller untuk praktik baik dan pemaparan masalah-masalah yang terjadi di satuan pendidikan	Mencantumkan agenda dalam surat dan mengundang satuan pendidikan untuk terlibat aktif	

14	Pendampingan PBD satpen PMO tatakelola Dinas Pendidikan	1. Partisipasi aktif peserta kurang 2. Tujuan PMO PBD dan Rapor tidak tercapai	1. Minat terjadap kegiatan yang bersifat dari kurang 2. Tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang pentingnya PMO	tidak didapatkannya data evaluasi implementasi Rapor Pendidikan dan PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Peserta diudang hanya sebagai partisipan yang pasif	Peserta dilibatkan juga secara lebih aktif misal sebagai story teller untuk praktik baik dan pemaparan masalah-masalah yang terjadi di satuan pendidikan	Mencantumkan agenda dalam surat dan mengundang satuan pendidikan untuk terlibat aktif	
15	Monev PPDB Tahun Ajaran 2023/2024				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
16	Monitoring tindaklanjut pendampingan PBD di Satpen oleh PMO Disdik Tahap 1	1. Partisipasi aktif peserta kurang 2. Tujuan PMO PBD dan Rapor tidak tercapai	1. Minat terjadap kegiatan yang bersifat dari kurang 2. Tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang pentingnya PMO	tidak didapatkannya data evaluasi implementasi Rapor Pendidikan dan PBD	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Peserta diudang hanya sebagai partisipan yang pasif	Peserta dilibatkan juga secara lebih aktif misal sebagai story teller untuk praktik baik dan pemaparan masalah-masalah yang terjadi di satuan pendidikan	Mencantumkan agenda dalam surat dan mengundang satuan pendidikan untuk terlibat aktif	
	Koordinasi Tim untuk menyusun sistem helpdesk rapor pendidikan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
	Monitoring tentang implementasi PBD disatuan pendidikan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
	Uji petik implementasi PBD di satuan pendidikan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
	Coaching clinic kepada Disdik dan Satpen terkait implementasi PBD Satpen jenjang PAUD				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
	Coaching clinic kepada Disdik dan Satpen terkait implementasi PBD Satpen jenjang SD	1. Objektive coaching clinic tidak tercapai sesuai yang ditetapkan 2. Peserta yang hadir tidak sesuai sasaran yang ditetapkan 3. Jaringan Internet di lokasi tidak memadai sehingga menghambat kegiatan	1. Kesadaran akan pentingnya kegiatan blm cukup dari sasaran 2. Kurangnya sarana dan prasarana	Pencapaian objektif akses rapor pendidikan oleh satuan pendidikan tidak maksimal sesuai rencana dan pbd di satuan pendidikan tidak 100% berjalan dengan baik di satuan pendidikan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Undangan langsung dr BPMP ke Satuan Pendidikan	Melibatkan pihak dinas pendidikan untuk mengundang satuan pendidikan	Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengundang sekolah	
	Coaching clinic kepada Disdik dan Satpen terkait implementasi PBD Satpen jenjang SMP	1. Objektive coaching clinic tidak tercapai sesuai yang ditetapkan 2. Peserta yang hadir tidak sesuai sasaran yang ditetapkan 3. Jaringan Internet di lokasi tidak memadai sehingga menghambat kegiatan	1. Kesadaran akan pentingnya kegiatan blm cukup dari sasaran 2. Kurangnya sarana dan prasarana	Pencapaian objektif akses rapor pendidikan oleh satuan pendidikan tidak maksimal sesuai rencana dan pbd di satuan pendidikan tidak 100% berjalan dengan baik di satuan pendidikan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Undangan langsung dr BPMP ke Satuan Pendidikan	Melibatkan pihak dinas pendidikan untuk mengundang satuan pendidikan	Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengundang sekolah	

Coaching clinic kepada Disdik dan Satpen terkait implementasi PBD Satpen jenjang SMA	1. Objektive coaching clinic tidak tercapai sesuai yang ditetapkan 2. Peserta yang hadir tidak sesuai sasaran yang ditetapkan 3. Jaringan Internet di lokasi tidak memadai sehingga menghambat kegiatan	1. Kesadaran akan pentingnya kegiatan blm cukup dari sasaran 2. Kurangnya sarana dan prasarana	Pencapaian objektif akses rapor pendidikan tidak maksimal sesuai rencana dan pbd di satuan pendidikan tidak 100% berjalan dengan baik di satuan pendidikan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Undangan langsung dr BPMP ke Satuan Pendidikan	Melibatkan pihak dinas pendidikan untuk mengundang satuan pendidikan	Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengundang sekolah
Coaching clinic kepada disdik dan satpen terkait implementasi PBD satpen jenjang SMK & SLB	1. Objektive coaching clinic tidak tercapai sesuai yang ditetapkan 2. Peserta yang hadir tidak sesuai sasaran yang ditetapkan 3. Jaringan Internet di lokasi tidak memadai sehingga menghambat kegiatan	1. Kesadaran akan pentingnya kegiatan blm cukup dari sasaran 2. Kurangnya sarana dan prasarana	Pencapaian objektif akses rapor pendidikan tidak maksimal sesuai rencana dan pbd di satuan pendidikan tidak 100% berjalan dengan baik di satuan pendidikan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Undangan langsung dr BPMP ke Satuan Pendidikan	Melibatkan pihak dinas pendidikan untuk mengundang satuan pendidikan	Koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengundang sekolah
Pengumpulan dan Pengolahan data hasil pendampingan PBD Satpen				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Menyusun laporan hasil pendampingan PBD satpen				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Distribusi Surat MM tentang SPM				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Kordinasi dengan stakeholder pendidikan Provinsi Lampung				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Pendampingan Perencanaan Daerah/SPM (Rakortek, RKAD)				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Koordinasi persiapan pemantauan indikator dalam RKPD				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Pelaksanaan pemantauan SPM dalam RKPD				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Koordinasi persiapan bahan pemantauan realisasi SPM Pendidikan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Pelaksanaan pemantauan realisasi SPM di Daerah				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Monitoring dan evaluasi				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			
Penyusunan program kerja UPT terkait AN dan Sulingjar				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala			

Rapat penyusunan program terkait AN dan Sulingjar				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Melakukan kickoff meeting program kerja UPT terkait AN dan sulingjar				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Mengalang/ mengelola mitra pembangunan di daerah terkait AN.				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Menentukan penanggung jawab AN di UPT dan tim pemantau Dashboard AN dan Sulingjar.				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Membentuk Tim dan Penanggung jawab AN dan Sulingjar				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Melakukan kordinasi persiapan Sosialisasi Pelaksanaan AN 2023 bagi stakeholder daerah dan satuan pendidikan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan AN dan peningkatan partisipasi AN dan Sulingjar di masing-masing daerah.	1. Pemerintah daerah tidak memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan AN dan Sulingjar 2. Pemerintah daerah tidak bersedia memberikan dorongan kepada satuan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan AN dan Sulingjar	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan AN dan Sulingjar yang diterima oleh peserta 2. Target pencapaian objektif kegiatan tidak tercapai	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu check-in belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan 3. Dalam surat undangan dilampiri dengan <i>term of reference</i> untuk memberikan gambaran urgensi kegiatan 4. Melibatkan pihak yang diundang dalam acara sebagai narasumber atau fasilitator	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Juni 2023
Verifikasi, Validasi Kesiapan Infrastruktur Satuan Pendidikan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Hasil Pemantauan Persiapan AN di Daerah				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				

Monitoring Pelaksanaan AN jenjang SD	1. Tujuan monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang ditetapkan tidak tercapai 2. Sekolah sasaran Monev pelaksanaan AN jenjang SD tidak memberikan respon yang cukup	Sekolah masih belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat AN	Partisipasi pelaksanaan AN jenjang SD tidak sesuai target yang ditetapkan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Adanya pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan	Adanya pembekalan teknis yang mendalam terkait POS/Juknis AN kepada petugas monev Adanya pemahaman yang baik terkait konten dan isi instrumen monev oleh petugas BPMP	Melakukan pembekalan mengenai juknis AN dan instrumen monev kepada petugas monev	Juli 2023
Monitoring Pelaksanaan AN jenjang SMP				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Monitoring Pelaksanaan AN jenjang SMA & SMK				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Monitoring Pelaksanaan AN jenjang Kesetaraan				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan AN di Daerah				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Pendampingan pelaksanaan gladi bersih AN jenjang SD				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Pendampingan pelaksanaan gladi bersih AN jenjang SMP				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Pendampingan pelaksanaan gladi bersih AN jenjang SMA & SMK				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Monitoring persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional melalui PMO daerah				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Pendampingan Posko AN tingkat daerah Tahap 1 (Sulingjar SD)				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				
Pendampingan Posko AN tingkat daerah Tahap 2 (Sulingjar PAUD)				Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala				

1	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua 3. Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan AN dan Sulinjar yang diterima oleh peserta 2. Target pencapaian objektif kegiatan tidak tercapai	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan 3. Dalam surat undangan dilampiri dengan <i>term of reference</i> untuk memberikan gambaran urgensi kegiatan 4. Melibatkan pihak yang diundang dalam acara sebagai narasumber atau fasilitator	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei 2023
2	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan AN dan peningkatan partisipasi AN dan Sulingjar di masing-masing daerah.	1. Pemerintah daerah tidak memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan AN dan Sulingjar 2. Pemerintah daerah tidak bersedia memberikan dorongan kepada satuan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan AN dan Sulinjar	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya informasi materi kebijakan AN dan Sulinjar yang diterima oleh peserta 2. Target pencapaian objektif kegiatan tidak tercapai	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Adanya pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan kegiatan	1. Adanya pembekalan teknis kepada petugas terkait POS AN/ Juknis AN sebelum pelaksanaan kegiatan 2. Melibatkan pihak yang diundang dalam acara sebagai narasumber atau fasilitator	Koordinasi dengan pihak disdik (pejabat) untuk berpartisipasi sebagai narasumber atau fasilitator bersama petugas BPMP	Juni 2023
3	Monitoring Pelaksanaan AN	1. Tujuan monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang ditetapkan tidak tercapai 2. Sekolah sasaran Monev pelaksanaan AN jenjang SD tidak memberikan respon yang cukup	Sekolah masih belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfaat AN	Partisipasi pelaksanaan AN jenjang SD tidak sesuai target yang ditetapkan	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Adanya pembekalan teknis kepada petugas sebelum pelaksanaan	1. Adanya pembekalan teknis yang mendalam terkait POS/Juknis AN kepada petugas monev 2. Adanya pemahaman yang baik terkait konten dan isi instrumen monev oleh petugas BPMP	Melakukan pembekalan mengenai juknis AN dan instrumen monev kepada petugas monev	Juli 2023
1	Melakukan sinkronisasi rencana kerja UPT dengan rencana kerja PDM	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya sinkronisasi rencana kerja UPT dengan rencana kerja PDM	Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei-23
2	Mendampingi dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi SE Transisi PAUD-SD	Sasaran pendampingan tidak sesuai dengan tujuan pendampingan Kesiapan ruang dan sarana kurang memadai sasaran pendampingan kurang antusias	Lebih memprioritaskan kegiatan pemerintah daerah (Bupati/Walikota)	Tidak maksimalnya pendampingan bersama dinas pendidikan dalam melakukan sosialisasi SE Transisi PAUD-SD	Kebijakan	3	Kadang terjadi	3	Moderat	14	3	sedang	Kepala	Petugas telah dibekali pemahaman tentang strategi pelaksanaan pendampingan sosialisasi SE Transisi PAUD-SD	Petugas yang ditugaskan berkoordinasi dengan tim yang menangani SE Transisi PAUD-SD	Dilakukan review	Apr-23

3	Koordinasi dengan dinas dalam rangka pemenuhan keperluan monev serta penggalan umpan balik	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya koordinasi dinas dalam rangka pemenuhan keperluan monev serta penggalan umpan balik	Operasional	3	Kadang terjadi	3	Moderat	14	3	sedang	Kepala	1. Penanggungjawab wilayah dari BPMP 2. tersedianya koordinator wilayah	1. Dalam surat pemberitahuan telah memuat waktu kegiatan 2. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan	1. menyampaikan surat ke dinas terkait 2. berkoordinasi dengan tim yang menangani SE Transisi PAUD-SD di daerah 3. tim BPMP melakukan koordinasi dengan tim daerah terkait SE Transisi PAUD-SD	Juni 2023
4	Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) pada FSP yang telah melewati bimtek FSP	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	1. Tidak maksimalnya sinkronisasi rencana kerja UPT dengan rencana kerja PDM	Operasional	2	Jarang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepala	Surat undangan hanya memuat batas waktu cekin belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei-23
5	Monitoring hasil pendampingan SE Transisi SE Transisi PAUD-SD	1. Responden tidak sesuai dengan tujuan moneva 2. Informasi yang diperoleh kurang akurat 3. Keterbatasan pemahaman responden terkait kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	1. Jadwal yang padat dan lebih memprioritaskan kegiatan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) 2. Surat pemberitahuan dari BPMP Provinsi Lampung kurang menjelaskan responden yang dibutuhkan 3. Kurangnya informasi tentang tujuan, manfaat, dan agenda moneva	1. Belum meratanya pendidikan inklusif yang bermutu 2. Aksesibilitas dan aktualisasi budaya inklusif masih rendah	operasional	3	Kadang- kadang	4	Signifikan	17	3	Tinggi	Petugas moneva	Koordinasi dengan sasaran moneva (bukan pejabat terkait) melalui telepon atau whatsapp	Koordinasi dengan sasaran moneva (langsung ke pejabat terkait dengan tujuan pendampingan, minimal eselon III) melalui telepon atau whatsapp	Dicantumkan dalam POS kegiatan	Maret - Desember 2022
1	Pendampingan implementasi kebijakan pendidikan khusus pada pendidikan inklusif terhadap pemerintah daerah gelombang	1. Peserta pendampingan tidak sesuai dengan tujuan pendampingan 2. Kesiapan ruang dan sarana kurang memadai 3. Peserta pendampingan kurang antusias	1. Jadwal yang padat dan lebih memprioritaskan kegiatan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) 2. Surat pemberitahuan dari BPMP Provinsi Lampung tidak menjelaskan kebutuhan sarpras pelaksanaan pendampingan 3. Kurangnya informasi tentang tujuan, manfaat, dan agenda pendampingan	1. Belum meratanya pendidikan inklusif yang bermutu 2. Aksesibilitas dan aktualisasi budaya inklusif masih rendah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	Tinggi	Petugas pendampi	Koordinasi dengan sasaran pendampingan (bukan pejabat terkait) melalui telepon atau whatsapp	Koordinasi dengan sasaran pendampingan (langsung ke pejabat terkait dengan tujuan pendampingan, minimal eselon III) melalui telepon atau whatsapp	Dicantumkan dalam POS kegiatan	Juli 2023
2	Advokasi implementasi kebijakan pendidikan khusus pada pendidikan inklusif terhadap pemerintah daerah gelombang	1. Peserta advokasi tidak sesuai dengan tujuan advokasi 2. Kesiapan ruang dan sarana kurang memadai 3. Peserta advokasi kurang antusias	1. Jadwal yang padat dan lebih memprioritaskan kegiatan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) 2. Surat pemberitahuan dari BPMP Provinsi Lampung tidak menjelaskan kebutuhan sarpras pelaksanaan pendampingan 3. Kurangnya informasi tentang tujuan, manfaat, dan agenda pendampingan	1. Belum meratanya pendidikan inklusif yang bermutu 2. Aksesibilitas dan aktualisasi budaya inklusif masih rendah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	Tinggi	Petugas advokasi	Koordinasi dengan sasaran advokasi (bukan pejabat terkait) melalui telepon atau whatsapp	Koordinasi dengan sasaran advokasi (langsung ke pejabat terkait dengan tujuan pendampingan, minimal eselon III) melalui telepon atau whatsapp	Dicantumkan dalam POS kegiatan	Juli 2023

3	Monitoring implementasi kebijakan pendidikan khusus pada pendidikan inklusif terhadap pemerintah daerah gelombang	1. Responden tidak sesuai dengan tujuan moneva 2. Informasi yang diperoleh kurang akurat 3. Keterbatasan pemahaman responden terkait kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	1. Jadwal yang padat dan lebih memprioritaskan kegiatan pemerintah daerah (Bupati/Walikota) 2. Surat pemberitahuan dari BPMP Provinsi Lampung kurang menjelaskan responden yang dibutuhkan 3. Kurangnya informasi tentang tujuan, manfaat, dan agenda moneva	1. Belum meratanya pendidikan inklusif yang bermutu 2. Aksesibilitas dan aktualisasi budaya inklusif masih rendah	Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	17	4	Tinggi	Petugas moneva	Koordinasi dengan sasaran moneva (bukan pejabat terkait) melalui telepon atau whatsapp	Koordinasi dengan sasaran moneva (langsung ke pejabat terkait dengan tujuan pendampingan, minimal eselon III) melalui telepon atau whatsapp	Dicantumkan dalam POS kegiatan	Juli 2023
---	---	--	--	--	-------------	---	----------------	---	------------	----	---	--------	----------------	--	---	--------------------------------	-----------

Kelompok Kerja 4

1	Sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten kota dan satuan pendidikan terkait pemahaman permendikbudristek No 63 tahun 2022	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	- Informasi tidak tersampaikan - Anggaran tidak terserap	Risiko Operasional	4	Sering Terjadi	3	Moderat	16	4	Tinggi	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Surat undangan hanya memuat batas waktu cek in dan belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei - Desember 2023
2	Melakukan pendampingan dalam percepatan pelaporan dana BOS melalui ARKAS 4.0	Pendampingan tidak maksimal	Sering bergantinya petugas di dinas dan di satuan pendidikan yang menangani BOS dan ARKAS	- Pelaporan BOS tidak selesai dan pencairan dana BOS selanjutnya tidak dapat dilakukan	Risiko Operasional	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	19	4	Tinggi	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Belum ada pengendalian terkait petugas yang ada di satuan pendidikan	1. Petugas adalah ASN dan memiliki perjanjian kontrak kerja 2. Menjelaskan konsekwensi saat mangkir dari tanggungjawab	Koordinasi dengan pihak terkait tentang tanggungjawab dan konsekwensi meninggalkan tugas	Mei - Desember 2023
3	Bimtek markas bagi tim PMO PMO tata kelola di Kabupaten/Kota (Daring)	- Peserta tidak dapat gabung/hadir	Jaringan internet kurang baik	- Informasi tersampaikan kurang maksimal	Risiko Operasional	4	Sering Terjadi	3	Moderat	16	4	Tinggi	kepala dan dinas pendidikan	Belum ada pengendalian terkait tata kelola di kabupaten/kota	Ditetapkan sebagai petugas yang mengikat dan bertanggungjawab dengan tugas yang dibebarkannya melalui SK Dinas dan SK Kementerian	Koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang pentingnya tatakelola satuan pendidikan	Mei - Desember 2023
4	Bimtek ARKAS 4.0 bagi satpen	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	- Anggaran tidak terserap	Risiko Operasional	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	19	4	Tinggi	kepala dan sekolah	Surat undangan hanya memuat batas waktu cek in dan belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekwensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekwensi keterlambatan hadir.	Mei - Desember 2023
5	Penyiapan bahan rapat koordinasi dengan UPT GTK dan UPT Vokasi dalam rangka peningkatan adopsi platform ARKAS dan SIPLah (Daring)	- Peserta tidak dapat gabung/hadir	Jaringan internet kurang baik	- Bahan rakor tidak maksimal	Risiko Operasional	3	Kadang Terjadi	3	Moderat	10	2	Rendah	Kepala	Belum ada pengendalian terkait petugas yang diundang dalam kegiatan daring	Mencari tempat yang memiliki koneksi internet yang stabil dan baik	Koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang pentingnya kegiatan dan penentuan tempat melakukan daring	Mei - Desember 2023
6	Pelaksanaan rapat koordinasi terkait adopsi platform ARKAS dan SIPLah (Daring)	- Peserta tidak dapat gabung/hadir	Jaringan internet kurang baik	- Informasi tersampaikan kurang maksimal	Risiko Operasional	3	Kadang Terjadi	3	Moderat	14	3	Sedang	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Belum ada pengendalian terkait petugas yang diundang dalam kegiatan daring	Mencari tempat yang memiliki koneksi internet yang stabil dan baik	Koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang pentingnya kegiatan dan penentuan tempat melakukan daring	Mei - Desember 2023
7	FGD terhadap dinas pendidikan dan satuan pendidikan tentang pemanfaatan SDS (Daring)	- Peserta tidak dapat gabung/hadir	Jaringan internet kurang baik	- Informasi tersampaikan kurang maksimal	Risiko Operasional	3	Kadang Terjadi	3	Moderat	14	3	Sedang	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Belum ada pengendalian terkait petugas yang diundang dalam kegiatan daring	Mencari tempat yang memiliki koneksi internet yang stabil dan baik	Koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang pentingnya kegiatan dan penentuan tempat melakukan daring	Mei - Desember 2023

8	Melakukan monitoring dan evaluasi adopsi platfoem SDS (ARKAS dan SIPLah) secara berkelanjutan serta tindak Lanjutnya	Tidak dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan	Waktu yang terbatas serta banyaknya satuan pendidikan yang harus di MONEV	Tidak tersampainya informasi terkait Arkas dan SIPLah ke seluruh satuan pendidikan	Risiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	13	3	Sedang	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	BPMP belum memiliki akun dalam memonitoring penggunaan ARKAS dan SIPLah	BPMP memiliki akun dalam memonitoring penggunaan ARKAS dan SIPLah	1. menyampaikan surat ke Direktorat Jenderal PAUDASMEN dalam pengajuan akun 2. Berkordinasi dengan tim teknis ARKAS dan SIPLah	Juni - Desember 2023
9	Melakukan pendampingan bersama dinas pendidikan untuk meningkatkan satuan pendidikan agar tidak melakukan sinkronisasi data mendekati batas waktu	Tidak dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan	Waktu yang terbatas serta banyaknya satuan pendidikan yang harus di MONEV	Tidak tersampainya informasi terkait sinkronisasi data saat mendekati batas waktu	Risiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	13	3	Sedang	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Menggunakan surat informasi digital	Menggunakan surat digital dan Dinas Pendidikan serta melibatkan pengawas	1. menyampaikan surat ke pendidikan Kab/Kota terkait informasi tersebut 2. Berkordinasi dengan tim teknis Dapodik, ARKAS dan SIPLah	Maret - Desember 2023
10	Bimtek pemanfaatan Chromobook	1. Peserta tidak hadir 100% pada hari pertama 2. Peserta baru 100% hadir pada hari kedua	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Tidak tersampainya informasi terkait pemanfaatan chromobook	Risiko Operasional	4	Sering Terjadi	5	Sangat Signifikan	24	5	Sangat Tinggi	kepala dan sekolah	Surat undangan hanya memuat batas waktu cek in dan belum memuat batas waktu kehadiran	1. Dalam surat undangan telah memuat waktu terakhir kehadiran peserta 2. Menjelaskan konsekuensi keterlambatan kehadiran peserta sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat undangan	Koordinasi dengan pihak terkait tentang batas waktu kehadiran peserta dan konsekuensi keterlambatan hadir.	Mei - Desember 2023
11	Pendampingan pengaktifan akun belajar id	Tidak dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan yang belum melakukan aktivasi akun belajar.id	Waktu yang terbatas dan banyaknya yang belum aktivasi akun belajar.id	aktivasi akun belajar.id tidak menajpai 100%	Risiko Operasional	4	Sering Terjadi	5	Sangat Signifikan	24	5	Sangat Tinggi	kepala dan sekolah	Menggunakan surat informasi digital dan daring	Menggunakan surat digital, daring tetapi melibatkan Dinas Pendidikan serta pengawas satuan pendidikan	1. menyampaikan surat ke pendidikan Kab/Kota terkait informasi tersebut 2. Berkordinasi dengan tim teknis Dapodik, ARKAS dan SIPLah	Maret - Desember 2023
12	Memfasilitasi pemanfaatan Google Workspace for Education di 50% satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing	Tidak dapat menjangkau 50% satuan pendidikan	Waktu yang terbatas	Tidak tersampainya informasi terkait pemanfaatan google workspace di 50% satuan pendidikan	Risiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	13	3	Sedang	kepala dan sekolah	Menggunakan surat informasi digital dan daring	Menggunakan surat digital, daring tetapi melibatkan Dinas Pendidikan serta pengawas satuan pendidikan	1. menyampaikan surat ke pendidikan Kab/Kota terkait informasi tersebut 2. Berkordinasi dengan tim teknis Dapodik, ARKAS dan SIPLah	Maret - Desember 2023
13	melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk memantau sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Chromobook (Daring)	- Peserta tidak dapat gabung/hadir	Jaringan internet kurang baik	- Informasi tersampaikan kurang maksimal	Risiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	17	4	Tinggi	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Petugas telah dibekali pemahaman tentang strategi dan materi yang akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota	Petugas yang ditugaskan berkoordinasi dengan tim yang menangani penyaluran chromebook di daerah	Dilakukan reuiu	Maret - Desember 2022
14	melakukan advokasi pmda agar memfasilitasi sekolah-sekolah yang menerima chromobook (Daring)	- Peserta tidak dapat gabung/hadir	Jaringan internet kurang baik	- Informasi tersampaikan kurang maksimal	Risiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	17	4	Tinggi	kepala, sekolah dan dinas pendidikan	Petugas telah dibekali pemahaman tentang strategi dan materi yang akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah	Petugas yang ditugaskan berkoordinasi dengan tim yang menangani sarpras di daerah	Dilakukan reuiu	Maret - Desember 2022
BMN RT																	
1	- Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Laporan SAI tidak Akuntabel	Realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran	transaksi belum register, saldo tidak normal	Risiko Operasional	2	Jarang terjadi	2	miror	7	2	Rendah	Kepala, Ka. Subag. Umum	Rekon internal Persediaan, SIMAK, SAIBA	Rekon internal Persediaan, SIMAK, SAIBA, Analisis Jurnal Pengiriman Data	Koordinasi ke Eselon I, dan ke Eksternal (KPKNL)	Januari s.d. Desember

2		Laporan BMN belum seluruhnya 3 T (tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik)	Kodefikasi barang belum tepat, kondisi barang tidak sesuai, pelaksanaan dan anggaran tidak sesuai dengan kebijakan aset tetap	pencatatan barang tidak sesuai kodefikasinya, analisis kebutuhan barang tidak sesuai, laporan tidak akuntabel	Risiko kebijakan dan Risiko Operasional	2	Jarang terjadi	3	Moderat	11	2	Rendah	Kepala, Ka. Subag. Umum, Bendahara Pengeluaran	Mencatat barang sesuai kode yang mendekati, melakukan penjumlahan aset secara manual,	Melaporkan ke pengelola barang untuk penambahan kode barang yang belum ada, melakukan revisi anggaran sesuai kebijakan aset tetap (bila memungkinkan) atau melakukan jurnal manual, melakukan inventarisasi secara berkala	Koordinasi E1, Setjen, dan Pengelola Barang	Januari s.d. Desember
3	- Pengelolaan Barang Milik Negara	Tuntutan Ganti Rugi Penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN	Penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kerugian Negara	Risiko kebijakan dan Risiko Operasional	2	Jarang terjadi	3	Moderat	11	2	Rendah	Kepala, Ka. Subag. Umum, Bendahara Penerimaan	Mengajukan PSP. Mengajukan Izin dan sewa tarif, menerbitkan SK pemanfaatan sewa, melaporkan hasil pemanfaatan secara berkala (per triwulan) ke Pengelola Barang, mengajukan persetujuan penghapusan dan melakukan tindaklanjut sesuai persetujuan tersebut)	Mengajukan PSP sesuai kewenangan, Mengajukan Izin dan sewa tarif sesuai kewenangan, menerbitkan SK pemanfaatan sewa, mengajukan penerbitan SK pemanfaatan sewa ke Pengguna Barang, melaporkan hasil pemanfaatan secara berkala (per triwulan) ke Pengelola Barang dan Pengguna Barang, mengajukan persetujuan penghapusan dan melakukan tindaklanjut sesuai persetujuan tersebut)	Melakukan koordinasi dan Asistensi Ke E1, Setjen, dan Pengelola Barang	Januari s.d. Desember
4	- Pemeliharaan Kantor (gedung, jalan, dan halaman)	a. Tidak dapat dilaksanakan, b. belum tepat penggunaannya c. Keterlambatan penyelesaian	Tidak sesuai RKBMN, kebijakan pelaksanaan anggaran, tidak sesuai dengan kebijakan aset tetap	Laporan tidak akuntabel karena pemeliharaan seharusnya menjadi beban tetapi menghasilkan aset	Risiko kebijakan dan Risiko Operasional	2	Jarang terjadi	3	Moderat	11	2	Rendah	Kepala, Ka. Subag. Umum, PPK, Bendahara Pengeluaran	Pemetaan kerusakan diawal tahun	Pemetaan kerusakan yg dijadikan dasar RKBMN tahun berikutnya, melakukan revisi mata anggaran bila memungkinkan, koordinasi Eselon I	Koordinasi ke Eselon I	Januari s.d. Desember
5	- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	a. Belum tepat kebutuhannya, b. Belum tepat jumlahnya, c. Belum tepat spesifikasinya	Analisis kebutuhan kurang akurat, dipasaran spesifikasi yang diinginkan masih setara	Fasilitas perkantoran yang diadakan belum maksimal	Risiko Operasional	3	Kadang terjadi	3	Moderat	14	3	Sedang	Kepala, Ka. Subag. Umum, PPK, Bendahara Pengeluaran	Verifikasi kebutuhan masing-masing seksi/subag	Verifikasi kebutuhan masing-masing seksi/subag, verifikasi keberadaan pasar	konfirmasi ke masing-masing seksi/subag hasil verifikasi keberadaan pasar	Januari s.d. Desember
6	Keamanan lingkungan kantor	1.1 Terjadinya gangguan keamanan	1.1 Kurangnya pengawasan oleh satuan pengamanan.	Kerugian materi	Resiko operasional	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	11	2	Rendah	Seluruh pegawai dan pengguna fasilitas asrama dan tamu kantor	Apel satuan pengamanan belum optimal.	Pengawasan/monitoring oleh koordinator satpam secara terjadwal.	Pelaksanaan di sesuaikan oleh SOP	Januari s.d. Desember
7		1.2 Bahaya kebakaran	1.2 lemahnya sdm thd tanggap bahaya kebakaran	Kerugian materi	Resiko operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	13	3	Sedang	Lembaga	Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai	monitoring secara terjadwal	Pelaksanaan di lakukan sesuai dengan SOP	Januari s.d. Desember
8	Kebersihan lingkungan kantor	2.1 layanan kebersihan tidak terpenuhi dengan baik	2.1 Lemahnya sdm (tenaga kebersihan)	Nilai layanan publik terkait kebersihan yg buruk	Resiko operasional	4	Sering	3	Moderat	16	4	Tinggi	PPNPN (kebersihan)	Pengawasan terhadap PPNPN (kebersihan)	Pengawasan secara ketat terhadap pramubakti (kebersihan)	Pelaksanaan di lakukan sesuai jadwal.	Januari s.d. Desember
9	Pelayanan Teknis (peralatan mesin dan listrik)	3.1 Terjadinya kegagalan fungsi/ kerusakan pada peralatan mesin dan listrik	3.1 lemahnya kemampuan teknis, kondisi alat dan mesin yang dapat rusak sewaktu waktu.	3.1 Layanan yang menggunakan peralatan mesin dan listrik tidak maksimal.	resiko operasional	4	sedang	4	Signifikan	19	4	Tinggi	PPNPN (teknis)	pengawasan terhadap PPNPN (Teknisi)	Pengawasan secara ketat terhadap PPNPN (Teknisi)	Pelaksanaan di lakukan sesuai jadwal.	Januari s.d. Desember
KTP																	
1	Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2022	Sebagian kecil pegawai terlambat melaporkan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Biro SDM	Kurangnya kepedulian pegawai untuk mengajukan penilaian kinerja pribadi kepada pimpinan	Terhambatnya proses usulan kepegawaian yang bersangkutan	Risiko Operasional	3	Kadang terjadi	3	Moderat	14	3	sedang	Masing-masing pegawai	Kepegawian proaktif dan intensif menginformasikan kekurangan dokumen penilaian kinerja	Tumbuhnya kepedulian pegawai untuk mengajukan penilaian kinerja pribadi kepada pimpinan	Melakukan Workshop penilaian kerja	Februari

2	CB Peningkatan Kompetensi Pegawai	Keikutsertaan tidak 100%	Belum ada pengendalian terkait kehadiran semua peserta	Capaian target peningkatan kompetensi tidak terpenuhi	Operasional	2	jarang terjadi	3	Moderat	11	2	sedang	Pimpinan	Melakukan konfirmasi kesanggupan/ketidaksanggupan peserta	harus ada sistem pengendalian dan sanksi terkait kehadiran semua peserta	Di awal tahun Melakukan perencanaan terkait CB Peningkatan kompetensi pegawai BPMP Prov Lampung	Des 2023 - jan 2024
3	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan ASN dan Non-ASN BPMP Prov Lampung	Hasil Penilaian bias	Validitas instrumen penilaian kurang baik	Penurunan tingkat kepercayaan terhadap akuntabilitas lembaga	Operasional	2	jarang terjadi	3	Moderat	11	2	sedang	Pimpinan	Dilakukan secara mendadak dan tidak terkonep	Harus dibuat instrumen penilaian yang valid dan reliable	Melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses Pemilihan dan Pemberian Penghargaan ASN dan Non-ASN BPMP Prov Lampung	Agustus
4	Pengusulan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, pensiun, satya lencana, dll)	Rentang waktu pemrosesan berkas sangat sempit	Kurang disiplin menyiapkan Kelengkapan berkas pribadi	Keterlambatan pengusulan kenaikan pangkat	Risiko Operasional	2	jarang terjadi	2	minor	7	2	rendah	Kepegawaian	Kepegawian proaktif dan intensif menginformasikan kekurangan dokumen	Tumbuhnya disiplin menyiapkan Kelengkapan berkas pribadi	Lembaga menyiapkan sistem pengelolaan arsip digital pegawai	Januari dan Juli
5	Penyimpanan arsip administrasi kepegawaian (Surat Pengusulan, SK, dll)	Sebagian arsip kurang tertata dengan baik	Belum tersedianya ruang arsip secara khusus	Proses pencarian arsip untuk keperluan tertentu menjadi lebih lama	Risiko Operasional	3	kadang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Kepegawaian	Pemilahan arsip aktif dan non aktif	Membuat pengelompokan arsip sesuai dengan jenisnya	Membuat pengelompokan arsip sesuai dengan jenisnya dan pemusnahan arsip secara kontinyu	Januari s.d Desember
6	Presensi Kehadiran	Keterlambatan melakukan presensi	Terlambat datang, lupa melakukan presensi	Pemotongan tunjangan kinerja	Risiko Operasional	3	kadang terjadi	3	moderat	14	3	sedang	Kepegawaian	Melakukan pergantian waktu terlambat dan mengisi form lupa absen	Pegawai melakukan presensi kehadiran sesuai jam kerja	Meningkatkan disiplin pegawai dengan cara menerapkan pemerian sanksi dan penghargaan	Januari s.d Desember

7	Sekretariat Angka Kredit Guru Gol IV.b ke atas	Hasil Penilaian DUPAK tidak ada dalam E-PAK	BPMP tidak memiliki akses kontrol Hasil Penilaian dalam aplikasi E-PAK	Tidak dapat memberikan solusi ketika Guru menanyakan hasil penilaian PAK-nya	Risiko Operasional	3	kadang terjadi	3	moderat	14	3	sedang	Tim PAK	Melihat data berkas di Sekretariat dan berkomunikasi dengan pihak GTK	Ada kontrol aplikasi E-PAK untuk mengetahui sejauh mana hasil penilaian DUPAK Guru dalam aplikasi	Berkoordinasi dengan leading sector (Direktorat GTK)	Januari s.d Desember
8	Reviu dan Penyusunan POS	Sebagian POS tidak mutakhir	Perkembangan Tata Kerja dan kondisi Organisasi yang senantiasa berubah	Sebagian Pokja atau substansi masih menjalankan prosedur lama	Risiko Operasional	3	kadang terjadi	2	minor	11	2	rendah	Tata Laksana	Beberapa pokja dan substansi sudah menjalankan sesuai POS yang ada meskipun POS belum dimutakhirkan	Seluruh pegawai memahami proses dan melaksanakan secara konsisten dari POS yang ada, sedangkan yang tidak ada dan belum sesuai dilakukan penyusunan dan perbaikan	Melakukan Inventarisasi POS yang ada dan segera melakukan penyusunan POS baru dan reviu POS yang sudah ada	April
9	SINDE (TTE)	Tidak semua surat dapat diproses menggunakan Tanda Tangan Elektronik	Keterlambatan dalam mengeksekusi surat, terdapat permintaan agar surat ditandatangani dan divalidasi secara manual	Surat harus dibuat dan ditandatangani secara manual	Resiko operasional	2	jarang terjadi	2	minor	7	2	rendah	lembaga	Koordinasi petugas persuratan dengan bag.kepegawaian	Sistem persuratan yang menggunakan SINDE/TTE dapat mengakomodir kebutuhan persuratan	Sosialisasi rutin (Apel, rapat periodik, dll)	Januari s.d Desember

KEUANGAN

1	GAJI DAN TUNJANGAN	Pembayaran tidak tepat waktu	Rekapitulasi daftar hadir terlambat diterima	uang Makan/ tukin terlambat diterima	Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	7	Rendah	Tidak perlu tindakan	Pegawai	menunggu rekapitulasi daftar hadir dan penilaian SKP	menetapkan setiap tanggal 2 bulan berjalan SKP sudah dinilai dan memberikan sanksi jika tidak tepat waktu	membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan log harian dan pengajuan realisasi setiap pegawai	Jan s.d. Des
		terjadi kelebihan/kesalahan pembayaran	kelalaian PPABP	kerugian negara	Operasional	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Kadang Terjadi	5	Sangat Rendah	Tidak perlu tindakan	BPMP	menarik kembali dari pegawai dan menyetorkannya ke kas negara	melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran	menugaskan 1 orang sebagai verifikator	Jan s.d. Des
2	PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL KANTOR	Pembayaran tidak tepat waktu	kelengkapan pembayaran lambat diserahkan petugas	tagihan operasional terlambat dibayarkan	Operasional	2	Jarang Terjadi	3	Kadang Terjadi	11	Rendah	Disarankan diambil tindakan	pegawai dan rekanan	mendesak pegawai rekanan untuk menyerahkan kelengkapan pembayaran	membuat kesepakatan untuk menyerahkan kelengkapan pembayaran paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan	mensosialisasikan melalui Rapat/apel	Jan s.d. Des
		terjadi kelebihan/kesalahan pembayaran	petugas kurang teliti	kerugian negara	Operasional	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Kadang Terjadi	5	Sangat Rendah	Disarankan diambil tindakan	BPMP	menarik kembali dari pegawai dan rekanan dan menyetorkannya ke kas negara	melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran	menugaskan 1 orang sebagai verifikator	Jan s.d. Des
3	PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL KANTOR	Pembayaran tidak tepat waktu	kelengkapan pembayaran lambat diserahkan petugas	tagihan operasional terlambat dibayarkan	Operasional	2	Jarang Terjadi	3	Kadang Terjadi	11	Rendah	Disarankan diambil tindakan	pegawai dan rekanan	mendesak pegawai rekanan untuk menyerahkan kelengkapan pembayaran	membuat kesepakatan untuk menyerahkan kelengkapan pembayaran paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan	mensosialisasikan melalui Rapat/apel	Jan s.d. Des
		terjadi kelebihan/kesalahan pembayaran	petugas kurang teliti	kerugian negara	Operasional	1	Hampir Tidak Terjadi	3	Kadang Terjadi	5	Sangat Rendah	Disarankan diambil tindakan	BPMP	menarik kembali dari pegawai dan rekanan dan menyetorkannya ke kas negara	melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran	menugaskan 1 orang sebagai verifikator	Jan s.d. Des

Mengetahui
Kepala PMP Provinsi Lampung



Dipone Achmadi, M.Ed.
198311071995121001

